

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi adalah kegiatan yang dilakukan bisnis untuk menghindari pelanggaran norma sosial. Teori Legitimasi, menurut Dowling (1975), dapat dikatakan penting bagi organisasi. Pentingnya menganalisis perilaku organisasi dalam kaitannya dengan lingkungan didorong oleh batasan yang diberlakukan oleh norma dan nilai sosial serta tanggapan terhadap batasan tersebut. Teori Legitimasi sebagaimana dijelaskan oleh Melsa Jumliana (2021) menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan dari para pemangku kepentingan bahwa mereka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang dianut oleh masyarakat tempatnya beroperasi, pelaku usaha secara terus menerus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan terhadap lingkungan dan kegiatan sosial. Namun, karena norma dan harapan masyarakat terus berubah, sulit untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan organisasi saat mengoperasikan organisasi di jalur ini (Fernando & Lawrence, 2014). ditarik kesimpulan bahwa teori legitimasi penting bagi perusahaan karena legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis dalam pertumbuhan perusahaan di masa depan. Dengan cara ini, keaslian telah menjadi aset dan organisasi sangat membutuhkan daya tahan usahanya. Hipotesis ini menjadi relevan dengan kekhasan pemeriksaan ini sebagai akibat dari kehadirannya wawasan bahwa paparan ekologi sangat menguntungkan untuk penyembuhan, peningkatan dan mengikuti keaslian organisasi, sehingga diperlukan aktivitas alami yang sangat maju. Melalui pengungkapan kewajiban sosial perusahaan (CSR) yang dituangkan dalam laporan tahunan. Agar pihak luar (stakeholder) dapat menerima atau memberikan legitimasi kepada perusahaan Melsa Jumliana, pelaku usaha yang ingin bertahan harus memastikan bahwa kegiatan usahanya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang digunakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan untuk beroperasi. Akibatnya, teori ini dapat dikaitkan dengan bagaimana bisnis dan masyarakat umum berinteraksi. Organisasi atau perkumpulan tidak bisa berjalan bisnis mereka sendiri namun mereka benar-benar membutuhkan hubungan yang baik baik dengan lingkungan setempat.

Pelaporan dan kegiatan CSR dapat mencapai legitimasi ini. Sebagai tindakan yang tidak berbahaya bagi ekosistem, kemajuan daerah setempat dan mengungkap berita positif yang akan membantu dalam memperluas keaslian asosiasi (Fernando dan Lawrence, 2014).

Pelopor organisasi dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban tanggapan sosial mereka akan sangat dirasakan untuk realitas dan posisi mereka oleh daerah setempat pada umumnya, dengan cara ini membuatnya lebih mudah bagi organisasi untuk mendapatkan eksekusi lebih baik. Lindblom (1994) berpendapat dalam Achmad (2007) bahwa sebuah organisasi dapat menggunakan empat strategi legitimasi ketika dihadapkan pada ancaman legitimasi yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengatasi kegagalan kinerja bisnis (seperti kecelakaan serius atau skandal keuangan), organisasi dapat:

- 1) Berusaha untuk mendidik pemangku kepentingannya tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- 2) Mencoba mengubah persepsi pemangku kepentingan terhadap suatu peristiwa (namun tidak mengubah kinerja aktual organisasi).
- 3) Mengalihkan (memanipulasi) perhatian dari masalah yang mengkhawatirkan (berkonsentrasi pada aktivitas positif sementara debu tidak terkait dengan kegagalan).
- 4) Mencoba mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja. Teori legitimasi dalam bentuk umumnya memberikan wawasan penting ke dalam praktik pengungkapan sosial perusahaan. Sebagian besar inisiatif pengungkapan sosial perusahaan utama dapat ditelusuri kembali ke satu atau lebih strategi legitimasi yang diusulkan Lindblom. Sebagai contoh, pola umumnya adalah perusahaan pintu masuk pengungkapan sosial menekankan hal positif untuk perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen negatif.

Utomo (2019) memahami bahwa hipotesis keaslian adalah hipotesis yang lebih berpusat pada kerja kolaborasi antara asosiasi dan masyarakat. Keaslian adalah kerangka kerja administrasi yang menyoroti kerentanan kerja dalam cara berperilaku penduduk, negara bagian individu, dan pertemuan. Hipotesis keaslian tergantung pada operasi hipotesis kesepakatan umum. Hipotesis ini muncul dari adanya hubungan proporsional pada tingkat sosial masyarakat, ditetapkan sebagai satu, tepat dan disesuaikan.

Perusahaan adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Itu masih mengudara di tengah masyarakat, di mana keduanya saling berdampak. Dengan demikian, keseimbangan membutuhkan kesepakatan bersama untuk menyepakati (Rismawati, 2020). Keaslian wilayah lokal merupakan komponen penting untuk perbaikan organisasi di masa depan. Ini dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong tugas-tugas metodologi bisnis, terutama untuk menempatkan diri dalam masyarakat yang lebih maju. Dengan cara ini, organisasi berusaha untuk mengikuti praktik normal penyebaran uang dalam iklim sosial untuk melakukan kewajiban sosial perusahaan dan jawaban untuk menjadi organisasi nyata. Mengenai pemeriksaan ini, hipotesis keaslian dapat digunakan sebagai sudut pandang untuk memahami bisnis tambahan selama alasan kerja dari berbagai tanda kegagalan organisasi dapat memenuhi komitmen sosial perusahaan dan menyelidiki hubungan antara organisasi dan lingkungan setempat, organisasi mencoba untuk menempatkan dirinya di mata publik untuk memenuhi asumsi keaslian. atau di sisi lain standar yang diperoleh di daerah mati saat ini (Syairozi, 2019).

Legitimacy theory menegaskan bahwa organisasi terus-menerus berusaha untuk beroperasi sesuai dengan batasan dan norma sosial (Deegan et al., 2002). Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa landasan teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di masa perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber daya ekonomi. Mekanisme corporate social responsibility adalah praktik tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa bisnis harus beroperasi sesuai dengan batas-batas dan norma-norma masyarakat. Ketika sebuah perusahaan sepenuhnya melaksanakan dan mengungkapkan program corporate social responsibility, kegiatannya dapat diakui oleh masyarakat.

Teori legitimasi mungkin merupakan mekanisme praktik tertua dan paling luas dalam mengungkapkan aktivitas CSR perusahaan dan praktik penutupan (Deegan dan Gordon, 1996; Milne dan Patten, 2002; Murthy dan Abeysekera, 2008; Uwuigbe dan Uadiale, 2011; Wilmshurst dan Frost, 2000). Teori ini digunakan secara umum dengan alasan bahwa organisasi akan memberi sinyal legitimasi mereka melalui pengungkapan inisiatif dan aktivitas mereka yang memuaskan (Gray

et al., 1995). Sehubungan dengan studi CSR, teori legitimasi tidak berbeda dari teori pemangku kepentingan, karena mereka tumpang tindih dan merupakan bagian integral dari kesimpulan ekonomi politik (Sinclair, 2001). Sejalan dengan teori legitimasi, Uwuigbe dan Uadiale (2011) mengemukakan bahwa setiap bisnis yang beroperasi di masyarakat harus mengikuti kontrak sosial, karena hal itu diperlukan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis. Menurut Patten (1992), ada korelasi positif antara pengungkapan praktik CSR dan legitimasi organisasi, yang menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih terlegitimasi semakin mereka terlibat dalam CSR.

2.2 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Stakeholder theory merupakan bahwa sebuah asosiasi bukanlah bagian yang utama bekerja untuk bantuan pemerintahnya sendiri, tetapi memberikan keuntungan bagi antek-anteknya (Chariri dan Ghozali, 2007). Teori pemangku kepentingan menegaskan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hak atas informasi tentang aktivitas perusahaan yang dapat berdampak pada pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan dalam proses implementasi tidak hanya mencakup kreditur dan investor tetapi juga pelanggan dan pemasok, serta lingkungan sebagai komponen kehidupan sosial. Teori pemangku kepentingan berpendapat bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial. Untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas bisnis dan operasi yang berkelanjutan yang terjamin, bisnis harus memastikan legitimasi pemangku kepentingan dan memasukkannya ke dalam kebijakan dan pengambilan keputusan (Hadi, 2011).

Menurut teori pemangku kepentingan yang dikembangkan oleh Donaldson dan Preston (1995), semua pemangku kepentingan organisasi berdampak pada kinerja organisasi; akibatnya, adalah tanggung jawab manajer untuk menawarkan manfaat kepada semua pemangku kepentingan yang berdampak pada kinerja organisasi. Menurut teori pemangku kepentingan, bisnis bekerja untuk melayani investor serta mitra yang tersisa (seperti bos pinjaman, klien, penyedia, negara bagian, pemerintah, dan pakar).

Stakeholder Teori, juga dikenal sebagai pemangku kepentingan, adalah setiap dan semua pihak—internal dan eksternal bisnis—dengan siapa ada hubungan yang menguntungkan dan yang dengannya bisnis dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung. Menurut teori pemangku kepentingan, bisnis harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingannya selain beroperasi untuk keuntungannya sendiri. (Ghozali dan Chariri, 2007). Dalam penggunaan mitra terdiri dari penyokong keuangan dan penyewa (mitra), namun selain penyedia, klien, termasuk iklim sebagai fitur kegiatan publik.

2.3 Variabel Yang Digunakan

2.3.1 Corporate Social Responsibility

Menurut WBCSD (The World Business Council for Sustainable Development) (2000), Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan 14 kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Berbagai alasan perusahaan untuk mengungkapkan informasi CSR, antara lain untuk memenuhi peraturan pemerintah melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Balita mewajibkan perusahaan untuk aktif dalam atau terkait dengan tanggung jawab sumber daya alam, sosial dan lingkungan. Regulasi lain yang mengemuka terkait pengoperasian CSR adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang menyatakan bahwa setiap pendukung keuangan diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban sosial perusahaan. Satu lagi pembedaan untuk pentingnya pemaparan CSR adalah arah pintu pendukung keuangan. Pendukung keuangan akan melakukan evaluasi ini melalui dampak prosedur CSR pada pelaksanaan keuangan organisasi.

Sesuai Gantino (2016), menyelesaikan tugas-tugas CSR akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran organisasi dalam jangka panjang. Keadaan ini dapat membawa keuntungan bagi organisasi. Dengan tujuan agar

CSR tidak harus dilihat sebagai kepentingan masyarakat, tetapi juga sebagai kebutuhan dunia usaha.

CSR merupakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan yang dijalankan pada perusahaan untuk beroperasi. Selain mempunyai tanggung jawab terhadap masalah sosial akibat kegiatan operasional suatu perusahaan, perusahaan juga berorientasi terhadap keuntungan (Cheng dan Cristiawan, 2011). Dengan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility suatu perusahaan mampu menambah rasa penerimaan masyarakat atas keberadaannya maka harus dengan konsisten dalam waktu jangka panjang (Chandrayanthi dan Saputra, 2013).

Sesuai Parengkuan (2017), Corporate Social Obligation (CSO) adalah sistem yang memungkinkan asosiasi atau organisasi untuk secara sengaja mengoordinasikan masalah alam dan sosial ke dalam pelaksanaannya dan berbicara dengan mitra, meninggalkan kewajiban yang lebih hierarkis di bidang yang sah. Sesuai norma ISO (Afiliasi Standar Keseluruhan) 26000, CSO adalah mentalitas kewajiban perusahaan menuju hasil *kick-the-container* yang muncul dari latihannya.

Mengejar pilihan untuk mengelola bisnisnya sesuai dengan pergantian peristiwa yang memungkinkan, khususnya mampu secara sosial, dengan mempertimbangkan asumsi mitra, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pintu masuk standar dunia dan difokuskan pada setiap asosiasi (Pratiwi, 2019).

Sesuai Purnaningsih (2018) alasan kerja Peraturan No. 40 Tahun 2007, CSO atau Social and Natural Obligation adalah kewajiban organisasi untuk memberikan keuntungan baik bagi organisasi maupun daerah setempat dan daerah setempat selama-lamanya mengambil bagian dalam perbaikan keuangan yang layak untuk menjamin kepuasan pribadi dan iklim. Sedangkan pada tahun 2007 Perda No. 25 mencirikan CSO sebagai kewajiban semua organisasi spekulasi untuk terus menjaga kerukunan dan mengimbangi sesuai dengan iklim, nilai, standar dan budaya masyarakat.

Firmansyah dan Mahardhika (2018) mengungkapkan bahwa keunggulan CSO terkait dengan mitra di dalam dan di luar, termasuk organisasi, jaringan, dan pemerintah. Manfaat CSO menurut perspektif organisasi adalah dapat memberikan gambaran positif tentang organisasi menurut perspektif masyarakat dan bangsa,

menunjukkan suatu bentuk kewajiban sosial perusahaan yang telah diselesaikan sebelum organisasi. Bagi daerah setempat, manfaat CSR adalah organisasi dapat fokus pada kepentingan masyarakat. Satu keuntungan lagi untuk area lokal adalah memperkuat hubungan antara organisasi dan area lokal dalam keadaan yang berharga secara umum. Manfaat CSR bagi badan publik adalah menjadi mitra dalam memenuhi misi sosial dan pemerintah di bidang kewajiban sosial, dan nantinya badan publik juga akan berperan membantu daerah setempat dalam memenuhi kebutuhannya. kebutuhan mendesak dan mendasar mereka. Firmansyah dan Mahardhika (2018) menemukan bahwa alasan CSR adalah agar organisasi melakukan latihan yang berbeda secara etis dan moral. Organisasi dapat melakukan kick the pail item untuk mengatasi masalah klien mereka. Latihan masuk terpisah dipimpin oleh pedoman moral dan moral. Selain mengizinkan organisasi untuk membagikan kegiatan mereka, CSR memungkinkan organisasi untuk memberikan informasi yang adil dan benar tentang produk dan kemajuan yang mereka hasilkan.

CSR adalah variabel penting bagi pembuat karena memberikan data tentang bundling item seperti sintesis, manfaat, jangka waktu kegunaan yang realistis, efek sekunder yang dapat dibayangkan, penggunaan yang sah, Efek Sosial Perusahaan... Salsabilla Annisa Massubagiyo; Dini Widyawati 5 jumlah, kualitas dan biaya yang melibatkan CSR dalam organisasi perakitan. Artinya, pembeli dapat membuat pilihan yang masuk akal untuk menggunakan produk tertentu atau tidak. Rumus Corporate Social Responsibility Yaitu :

$$1. \text{CSRDI}_j = \sum \frac{X_{ji}}{n_j}$$

Keterangan :

- CSRDI_j = Corporate Social Responsibility (CSR) Indeks
- Perusahaan n_j = Jumlah kriteria pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perusahaan j , $n_j \leq 91$
- $X_{ij} = 1$ = Jika kriteria diungkapkan; 0 = Jika kriteria tidak diungkapkan

2. Corporate Social Responsibility = Log alami dari jumlah aktual yang dihabiskan untuk kegiatan CSR

2.3.2 Kinerja Keuangan

Dalam menjalankan usahanya, administrasi moneter suatu organisasi memerlukan perangkat estimasi pelaksanaan moneter untuk menilai organisasi tersebut. Eksekusi moneter adalah tendangan umum istilah umum yang digunakan untuk beberapa atau pameran semua organisasi selama jangka waktu tertentu, di samping beberapa tindakan seperti biaya yang dapat diverifikasi atau diantisipasi. Firdausi et al., (2018) mengungkapkan bahwa eksekusi moneter merupakan kajian yang dilakukan untuk melihat perkembangan besar yang telah dicapai oleh organisasi dengan menggunakan standar eksekusi moneter yang benar dan tepat. Utami (2017) merekomendasikan bahwa penyajian moneter dapat diestimasi dengan memecah luasan moneter. Membongkar pelaksanaan moneter adalah alasan untuk menilai dan menghancurkan pelaksanaan bisnis atau pelaksanaan fungsional suatu organisasi. Proporsi moneter dimaksudkan untuk menilai laporan moneter yang berisi data tentang posisi berkelanjutan organisasi dan pelaksanaan masa lalu. Menurut Rahayu (2020), petunjuk pelaksanaan keuangan dikaji dalam tiga kelompok:

- 1) Proporsi manfaat, penanda alasan fungsional pelaksanaan pendapatan organisasi dan keuntungan dari usaha,
- 2) Tingkat pengembangan, proporsi kemampuan organisasi untuk menempatkan ekonomi dalam iklim perkembangan moneter dan dalam industri atau pasar di mana hal itu bekerja,
- 3) Produktivitas fungsional, untuk lebih spesifik hubungan antara sumber daya dewan dan spekulasi memperkirakan kelangsungan pilihan usaha organisasi dan pemanfaatan aset.

Kinerja keuangan adalah pekerjaan yang telah diselesaikan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu, dan dicatat dalam laporan anggaran organisasi yang bersangkutan (Dhuhriansyah dan Asyik, 2011). Pameran organisasi keuangan akan digunakan oleh pendukung keuangan, bos pinjaman, dan pertemuan lain sebagai alasan untuk mensurvei kesejahteraan umum organisasi. Pada dasarnya investor ingin berinvestasi pada suatu perusahaan karena mengharapkan keuntungan, dan tentunya dalam hal ini investor akan sangat berhati-hati dalam mengambil

keputusan investasi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan rasio keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Sesuai Sujarweni (2019), proporsi manfaat digunakan untuk mengukur tingkat manfaat yang sebanding dengan kesepakatan anak atau sumber daya, untuk mengukur kapasitas organisasi untuk menghasilkan manfaat yang sesuai dengan kesepakatan, sumber daya dan manfaat dan nilai. Rumus kinerja keuangan yaitu:

Rumus kinerja Keuangan yaitu :

$$1) \text{ Return on Assets (ROA) } = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.3.3 Stabilitas Keuangan

Stabilitas keuangan adalah kondisi alokasi keuangan dan pengelolaan keuangan berfungsi dengan baik serta dapat mendukung operasional suatu perusahaan. Keuangan yang stabil merupakan keuangan yang kuat serta tahan terhadap berbagai gangguan sehingga fungsi bisnis perusahaan berjalan dengan baik. Schinasi (2004) berpendapat bahwa stabilitas keuangan didefinisikan sebagai kemampuan dari sistem keuangan untuk

- a. memfasilitasi secara efisien alokasi-alokasi sumber daya ekonomi yang ada baik secara spasial dan intertemporal,
- b. mengatasi, mengalokasikan dan menajga resiko finansial,
- c. memlihara dan menjaga kemampuan beroperasi secara baik meslipun terjadi guncangan atau ketidakseimbangan melalui mekanisme sistem keuangan itu sendiri.

Stabilitas Keuangan juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam memilih entitas dalam berinvestasi. Salah satu penelitian menyatakan bahwa CSR dapat menawarkan mitigasi risiko bagi perusahaan dan peningkatan kinerja dalam jangka panjang (Chollet & Sandwidi, 2018). Melalui risiko yang semakin dimitigasi, kemungkinan untuk menurunkan kinerja perusahaan akan semakin kecil sehingga mempengaruhi stabilitas perusahaan. .

Ciri-ciri yang diinginkan dari definisi stabilitas keuangan:

- a. Definisi yang baik mengenai stabilitas keuangan harus jelas berkaitan dengan kesejahteraan. Dengan kata lain, stabilitas keuangan harus menjadi keadaan yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat, jika tidak maka upaya untuk meningkatkan stabilitas keuangan tidak akan menjadi tujuan kebijakan publik yang baik. Demikian pula, ketidakstabilan keuangan harus didefinisikan sebagai sesuatu yang menimbulkan biaya kesejahteraan yang besar.
- b. Stabilitas keuangan harus merupakan keadaan yang dapat diamati, sehingga pihak yang bertanggung jawab menjaga stabilitas keuangan dapat mengetahui apakah mereka berhasil atau tidak. Sayangnya, seperti yang akan kami tunjukkan, stabilitas keuangan dalam definisi apa pun yang masuk akal hanya dapat diamati secara tidak lengkap.
- c. Stabilitas keuangan harus dikendalikan atau dipengaruhi oleh otoritas publik. Jika tidak, maka jelas tidak ada gunanya dijadikan tujuan kebijakan publik.
- d. Stabilitas keuangan harus menjadi milik suatu entitas yang signifikan secara politik dan memiliki definisi yang jelas. Dalam banyak kasus, hal ini berarti bahwa stabilitas keuangan didefinisikan sebagai milik suatu negara. Namun dalam beberapa kasus, instrumen kebijakan tidak semuanya berada pada tingkat pemerintahan yang sama. Misalnya, di Amerika Serikat, beberapa instrumen kebijakan yang relevan berada dalam yurisdiksi masing-masing negara bagian, sementara instrumen lainnya, termasuk kebijakan moneter dan fiskal, berada dalam wewenang otoritas federal. Ada analogi pembagian kekuasaan dan tanggung jawab di Uni Eropa antara badan-badan UE dan negara-negara anggota. Namun, pembagian ini dalam beberapa kasus kurang jelas dibandingkan di Amerika Serikat.⁵
- e. Dalam mendefinisikan stabilitas keuangan, perlu diingat bahwa bukan hanya lembaga keuangan yang keruntuhannya dapat menyebabkan kerusakan ekonomi. Hal yang sama juga terjadi pada banyak perusahaan lain. Kepentingan kebijakan publik terhadap stabilitas keuangan mencerminkan kesadaran akan kerusakan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh ketidakstabilan keuangan. Ada banyak episode yang dapat diidentifikasi dalam sejarah, yang secara umum disepakati sebagai periode ketidakstabilan keuangan. Depresi Besar pada tahun 1930an mungkin merupakan contoh utama, namun masih banyak contoh lainnya. Oleh karena itu, dukungan darurat resmi kadang-kadang diberikan tidak hanya kepada lembaga-lembaga

keuangan yang mengalami kesulitan keuangan, namun juga kepada perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan kepada negara-negara berdaulat. Pertimbangan yang menentukan apakah dukungan tersebut akan diberikan hampir sama dalam semua kasus ini. Definisi dan analisis stabilitas (atau ketidakstabilan) keuangan harus cukup luas untuk mencakup semua kasus tersebut, meskipun lembaga-lembaga publik yang ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut mungkin sangat berbeda.

- f. Definisi stabilitas keuangan tidak boleh terlalu menuntut sehingga menstigmatisasi perubahan apa pun sebagai bukti ketidakstabilan. Rigor baik-baik saja, tetapi rigor mortis tidak. Perekonomian dan struktur keuangan perlu berubah dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dan upaya untuk mencegah perubahan tersebut atas nama stabilitas keuangan akan sia-sia dan merugikan. Stabilitas keuangan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{ROA + (\text{Total Equity} / \text{Total Assets})}{\text{Std. Deviation (ROA)}}$$

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian membutuhkan berbagai penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

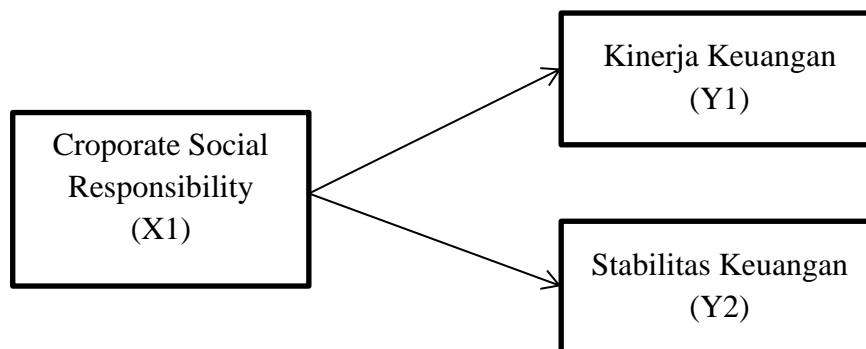
| No | Judul | Penulis | Variabel | Hasil |
|----|--|---|---|--|
| 1 | How does corporate social responsibility affect financial performance, financial stability, and financial inclusion in the banking sector? Evidence from Pakistan. | Muhammad Ramzan, Muhammad Amin, Muhammad Abbas/2021 | Independent CSR Dependent Financial Performance Financial Inclusion Financial Stability | Hasilnya menunjukkan bahwa CSR Berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan dan stabilitas keuangan. |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 2 | Study on the Relationship between CSR and Financial Performance. | Sang Jun Cho, Chune Young Chung, Jason Young/ 2019 | Independent CSR Dependent Financial Performance | Hasilnya menunjukkan bahwa CSR Berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan. |
| 3 | Does CSR contribute to the financial sector's financial stability? The moderating role of a sustainability committee | Nurlan Orazalin, Cemil Kuzey, Ali Uyar, Abdullah S. Karaman / 2022 | Independent CSR Dependent Financial Stability | Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif CSR Berpengaruh negatif signifikan pada stabilitas keuangan. |
| 4 | Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Keuangan Kinerja, Inklusi Keuangan, dan Stabilitas Keuangan. | Ambawani Restu Widi, Dwi Mimpri Rizkiawati , Farah Margaretha Leon/ 2021 | Independent CSR Dependent Financial Performance Financial Inclusion Financial Stability | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dan inklusi keuangan. |
| 5 | Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan | Karina Odia Julialevi , Wita Ramadhanti/2021 | Independen Corporate Social Responsibility (CSR) Dependent ROA | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh secara |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | Indonesia (Studi Komparatif Perbankan BUMN dan Swasta). | | ROE NIM CAR | positif terhadap kinerja keuangan. |
| 6 | Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2013-2018). | Dina Mercuri, Anggita Langgeng Wijaya, M. Agus Sudrajat/ 2019 | Independent CSR Dependent Financial Performance | Hasil penelitian ini menunjukkan pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. |

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut :



Gambar 2.1 Karangka Pemikiran

2.6 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan asumsi sementara mengenai fenomena yang hendak diteliti. Pembentukan hipotesis berdasar pada teori dan referensi yang ada. Hipotesis dirumuskan dari hasil riset sebelumnya. Menurut Sugiyono (2016) dalam Oktapianti (2019) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

2.6.1 Pengaruh CSR Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan kajian literatur yang sudah dipaparkan, hipotesis dapat dibuat sesuai dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa CSR dapat berpengaruh atau tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan seperti penelitian oleh (Muhammad Ramzan, Muhammad Amin, Muhammad Abbas, 2021) yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dan sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ambawani Restu Widi, Dwi Mimpi Rizkiawati, Farah Margaretha Leon, 2021) yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Dina Mercuri, Anggita Langgeng Wijaya, M. Agus Sudrajat, 2019) yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, peneliti dapat membuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga Corporat Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

2.6.2 Pengaruh CSR Terhadap Stabilitas keuangan

Berdasarkan kajian literatur yang sudah dipaparkan, Penelitian yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan seperti penelitian oleh (Muhammad Ramzan, Muhammad Amin, Muhammad Abbas, 2021) yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap stabilitas keuangan dan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nurlan Orazalin, Cemil Kuzey, Ali Uyar, Abdullah S. Karaman, 2022) yang menyatakan bahwa

Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H2 : Diduga Corporat Social Responsibility berpengaruh signifikan pada Stabilitas Keuangan.